





# Socializaci Decomini Divoliule in Buletin Implementasi & Panduan Praktik

13Juni 2024 Kamis | 14.00-16.00 WIB

# DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI (DSAK IAI)



Indra Wijaya Ketua



Alexander Adrianto Anggota



Aria Farah Mita Anggota



Bahrudin Anggota



Dede Rusli Anggota



Devi S Kalanjati Anggota



Dini Rosdini Anggota



Elisabeth Imelda Anggota



Endro Wahyono Anggota



Irwan Lawardi Lau Anggota



M. Maulana Anggota



Nurhasan Anggota



Zuni Barokah Anggota







# TENTANG BULETIN IMPLEMENTASI & PANDUAN PRAKTIK

	BULETIN IMPLEMENTASI	PANDUAN PRAKTIK
Produk Lain Terkait SAK		
Tidak Mengubah Persyaratan SAK		5801268130106456 580126813010646 580126813010646 580126813010646 580126813010646 58012681301064 5801268130
Otoritas	Buletin Implementasi memperoleh otoritasnya dari Standar itu sendiri.	Panduan tidak wajib. Penerapannya tidak disyaratkan menyatakan kepatuhan terhadap SAK
lsi	Umumnya berisi <b>materi penjelasan</b>	Berisi <b>panduan</b> dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK
Rujukan	IFRIC Agenda Decisions; atau isu implementasi SAK yang bersifat lokal	IFRS Practice Statement









# LATAR BELAKANG PENERBITAN PANDUAN PRAKTIK SAK – MEMBUAT PERTIMBANGAN MATERIALITAS

01

Kerangka Konseptual dan PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07 memberikan definisi informasi material 02

Konsep materialitas bertindak sebagai filter yang digunakan manajemen untuk menyaring informasi dalam memastikan laporan keuangan mencakup semua informasi material

03

# Mengapa beberapa pemangku kepentingan merasa materialitas sulit diterapkan?

- a. Apakah suatu informasi bersifat material atau tidak, merupakan masalah pertimbangan yang didasarkan pada berbagai faktor dan keadaan spesifik-entitas. Terdapat kecenderungan menggunakan persyaratan pengungkapan dalam SAK seolah-olah merupakan item checklist.
- Beberapa pemangku kepentingan berpendapat bahwa terdapat kurangnya panduan untuk membantu manajemen memahami konsep materialitas.
- c. Kesulitan dalam praktik berkontribusi terhadap masalah pengungkapan entitas memasukkan terlalu banyak informasi yang tidak relevan dan tidak cukup informasi relevan dalam laporan keuangan.









# MENGAPA DITERBITKAN PANDUAN PRAKTIK SAK – MEMBUAT PERTIMBANGAN MATERIALITAS

Panduan Praktik diterbitkan sebagai panduan tidak wajib (non-mandatory), karena:



penerbitan persyaratan wajib dalam suatu Standar dapat menimbulkan risiko memberikan kesan bersifat preskriptif, yang dapat melemahkan penekanan penerapan pertimbangan ketika entitas melakukan penilaian materialitas; dan



menerbitkan panduan sebagai dokumen tidak wajib yang terpisah, dan bukan sebagai panduan implementasi tidak wajib yang mendukung suatu Standar tertentu, seperti PSAK 201, akan membantu menekankan bahwa konsep materialitas bersifat pervasif di seluruh SAK.

















Terdiri atas **9 Buletin Implementasi** yang merujuk pada **9 Agenda Decisions** yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC)

#### PSAK 117 dan PSAK 109

Piutang premi yang diterima dari perantara

#### **PSAK 116**

Definisi sewa – hak substitusi

#### **PSAK 201**

Pengungkapan kelangsungan usaha

#### **PSAK 202**

Biaya yang diperlukan untuk menjual persediaan

#### **PSAK 210**

Penyusunan laporan keuangan ketika entitas tidak memiliki kelangsungan usaha

#### **PSAK 227**

Merger antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri

#### **PSAK 238**

Hak pelanggan untuk menerima akses ke perangkat lunak pemasok yang ditempatkan di awan

#### **PSAK 238**

Biaya konfigurasi atau kustomisasi dalam pengaturan komputasi awan (cloud computing)

#### **PSAK 238**

Pembayaran pengalihan pemain



# PROTOKOL ZOOM MEETING







Unmute

Microphone peserta dalam posisi mute



Start Video

Video peserta dalam posisi off



Recording

Acara direkam dan IAI dapat menayangkan pada media komunikasi IAI



A&Q

Gunakan tombol Q&A untuk mengajukan pertanyaan

Materi dan rekaman dapat diakses pada website IAI/media komunikasi yang akan diinformasikan kemudian atau sesuai ketentuan IAI.



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Tele: (C21) 21904232, 3900004, 3140664





















# **DISCLAIMER**

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.









# **Buletin Implementasi Vol 3**

## **PSAK 227**

01

Merger antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri

## **PSAK 238**

- Hak pelanggan untuk menerima akses ke perangkat lunak pemasok yang ditempatkan di awan
- O3 Biaya konfigurasi atau kustomisasi dalam pengaturan komputasi awan (cloud computing)
- 04 Pembayaran pengalihan pemain









Merger antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri

**PSAK 227** 

Membahas bagaimana entitas induk mencatat transaksi merger dengan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 227, apakah dicatat sebagai kombinasi bisnis sesuai PSAK 103 atau tidak dicatat sebagai kombinasi bisnis?

#### **POLA FAKTA**

- a. Entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri dan mengakui investasi pada entitas anak sesuai PSAK 227 paragraf 10
- b. Entitas anak mencakup suatu bisnis (sebagaimana PSAK 103: Kombinasi Bisnis)
- c. Entitas induk merger dengan entitas anak, sehingga mengakibatkan bisnis entitas anak tersebut menjadi bagian dari entitas induk (transaksi merger)

#### **PEMBAHASAN**

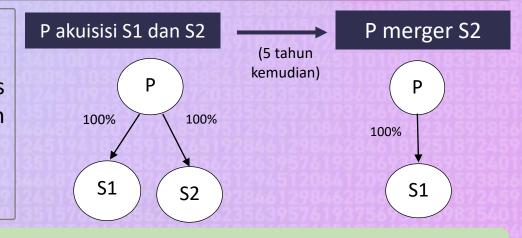
#### **MERUPAKAN KOMBINASI BISNIS**

Menerapkan metode akuisisi (dan persyaratan terkait) dalam PSAK 103.

\*Kombinasi bisnis dalam pola fakta dimaksud bukan merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Entitas menerapkan PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali untuk kombinasi bisnis antara entitas sepengendali.

# BUKAN MERUPAKAN KOMBINASI BISNIS

Mengakui aset dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatat sebelumnya



**KESIMPULAN** 

Entitas induk tidak menerapkan metode akuisisi (dan persyaratan terkait) dalam PSAK 103







Hak Pelanggan untuk Menerima Akses ke Perangkat Lunak Pemasok yang Ditempatkan di Awan

**PSAK 238** 

Membahas bagaimana pelanggan mencatat pengaturan komputasi awan *Software as a Service* (SaaS), di mana pelanggan **membayar fee sebagai imbalan atas hak untuk menerima akses** ke aplikasi perangkat lunak pemasok. Apakah pelanggan menerima **aset perangkat lunak** pada tanggal permulaan kontrak **atau menerima jasa** selama masa kontrak?

#### **POLA FAKTA**

- a. Pelanggan mencatat pengaturan komputasi awan SaaS
- b. Kontrak tidak memberikan hak apa pun kepada pelanggan atas aset berwujud, kecuali akses ke aplikasi perangkat lunak
- c. Pelanggan membayar fee untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak

#### **PEMBAHASAN**

#### Perangkat Lunak Sebagai Sewa (PSAK 116)

Kontrak memberikan hak untuk menggunakan aset, jika selama periode penggunaan, pelanggan **mengendalikan 'aset identifikasian'** (hak mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik & mengarahkan penggunaan aset).

#### Perangkat Lunak Sebagai Aset Takberwujud (PSAK 238)

Pelanggan mengendalikan set takberwujud jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang mengalir dari aset tersebut dan untuk membatasi akes pihak lain atas manfaat ekonomik tersebut.

#### **Kontrak Jasa**

Kontrak hanya memberikan hak menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok selama masa kontrak, sehingga:

- a. kontrak tersebut **tidak mengandung sewa perangkat lunak**.

  Hak untuk menerima akses tidak dengan sendirinya memberikan pelanggan hak pengambilan keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa perangkat lunak tersebut digunakan
- b. pelanggan **tidak menerima aset takberwujud** perangkat lunak pada tanggal permulaan kontrak

Kontrak yang hanya memberikan kepada pelanggan hak untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok di masa depan adalah **kontrak jasa**.

**KESIMPULAN** 







## Biaya Konfigurasi atau Kustomisasi dalam Pengaturan Komputasi Awan (Cloud Computing)

**PSAK 238** 

Apakah pelanggan mengakui **aset takberwujud sehubungan dengan konfigurasi atau kustomisasi** aplikasi perangkat lunak? Jika aset takberwujud tidak diakui, **bagaimana pelanggan mencatat** biaya konfigurasi atau kustomisasi tersebut?

#### **POLA FAKTA**

- a. Pelanggan menyepakati kontrak Software as a Service (SaaS) dan menerima hak akses ke aplikasi selama masa kontrak
- b. Pelanggan mengeluarkan biaya untuk melakukan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi di mana pelanggan menerima akses
- c. Pelanggan tidak menerima barang atau jasa yang lain

#### **PEMBAHASAN**

### Mengakui aset takberwujud sehubungan dengan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak?

Dalam pola fakta, pelanggan sering kali tidak mengakui aset takberwujud karena tidak mengendalikan perangkat lunak yang dikonfigurasi atau dikustomisasi, dan aktivitas konfigurasi atau kustomisasi tersebut tidak menghasilkan sumber daya yang dikendalikan oleh pelanggan yang terpisah dari perangkat lunak.

Jika aset takberwujud tidak diakui, bagaimana pelanggan mencatat biaya konfigurasi atau kustomisasi tersebut?

- Sebagai beban ketika pelanggan menerima jasa konfigurasi atau kustomisasi atau ketika pemasok pihak ketiga melakukan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi
- b. Pelanggan dapat merujuk PSAK 115 dalam menentukan kapan pemasok melaksanakan jasa konfigurasi atau kustomisasi sesuai dengan kontrak untuk menyerahkan jasa tersebut.
- c. Pelanggan menerapkan PSAK 238 paragraf 69-69A:
  - jika jasa bersifat dapat dibedakan biaya diakui sebagai beban ketika pemasok melakukan konfigurasi/kustomisasi
  - ii. jika jasa bersifat tidak dapat dibedakan- biaya diakui sebagai beban ketika pemasok memberikan akses ke aplikasi selama masa kontrak
- d. Mengakui pembayaran di muka sebagai aset jika jasa belum diterima

#### **KESIMPULAN**

Pelanggan **tidak mengakui** aset takberwujud. PSAK 238 memberikan dasar yang memadai untuk menentukan akuntansi atas biaya konfigurasi atau kustomisasi sehubungan dengan pengaturan SaaS







#### **Pembayaran Pengalihan Pemain**

**PSAK 238** 

Membahas tentang pengakuan atas pembayaran pengalihan pemain yang diterima, apakah diakui sebagai pendapatan (PSAK 115) atau mengakui keuntungan/kerugian sebagai pelepasan aset takberwujud (PSAK 238)?

#### **POLA FAKTA**

- a. Klub sepak bola (entitas) mengalihkan pemain ke klub lain (klub penerima), di mana kontrak kerja dan status pemain akan terdaftar dalam sistem pengalihan elektronik entitas
- b. Biaya yang terjadi untuk memperoleh hak pendaftaran diakui sebagai aset takberwujud. Entitas menggunakan dan mengembangkan pemain dalam pertandingan sebagai bagian aktivitas normal
- c. Entitas menerima pembayaran pengalihan dari klub penerima dan akibatnya merilis pemain dari kontrak kerja. Status terdaftar dalam sistem entitas akan dihapuskan ketika klub penerima mendaftarkan pemain dan memperoleh hak baru
- d. Entitas **menghentikan pengakuan aset takberwujud** pada saat klub penerima mendaftarkan pemain dalam sistem pengalihan elektronik

#### **PEMBAHASAN**

- a. Entitas mengakui hak pendaftaran sebagai aset takberwujud, sehingga menerapkan penghentian pengakuan dalam PSAK 238
- b. Pembayaran pengalihan mengompensasi entitas atas pelepasan hak pendaftaran dan, oleh karena itu, merupakan bagian dari hasil pelepasan neto
- c. Entitas mengakui **pembayaran pengalihan yang diterima sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian** yang timbul dari penghentian pengakuan hak pendaftaran
- d. Dalam pola fakta, entitas menyajikan penerimaan kas dari pembayaran pengalihan sebagai bagian dari aktivitas investasi

**KESIMPULAN** 

Pembayaran pengalihan pemain **merupakan bagian dari hasil pelepasan neto** sehingga entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas pelepasan tersebut sesuai PSAK 238







# **Buletin Implementasi Vol 3**

# PSAK 109 dan PSAK 117



Piutang premi yang diterima dari perantara









## **Pola Fakta**

A Perantara (Pialang Asuransi)

**Pemegang Polis** 

- A Kontrak Asuransi
- **B** Kontrak Jasa

- Pialang asuransi bertindak sebagai penghubung antara asuradur dan pemegang polis untuk mengatur kontrak asuransi antara pihak-pihak tersebut.
- Pemegang polis telah membayar premi secara tunai kepada pialang asuransi, tetapi asuradur belum menerima secara tunai premi dari pialang asuransi.
- Perjanjian antara asuradur dan pialang asuransi memungkinkan pialang asuransi untuk membayar premi kepada asuradur di kemudian hari.
- Ketika pemegang polis membayar premi kepada pialang asuransi, pemegang polis melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi dan asuradur wajib menyediakan jasa kontrak asuransi kepada pemegang polis.
- Jika pialang asuransi gagal membayar premi kepada asuradur, asuradur tidak memiliki hak untuk menuntut premi dari pemegang polis, atau untuk membatalkan kontrak asuransi.









# Pertanyaan – apakah piutang premi dari pialang asuransi merupakan:

- arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi dan termasuk dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan menerapkan PSAK 117 (Pendapat 1); atau
- 2. merupakan aset keuangan terpisah dengan menerapkan PSAK 109 (Pendapat 2).









#### PENDAPAT 1 – PSAK 117

 Piutang premi dari pialang asuransi merupakan arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi.

#### PENDAPAT 2 – PSAK 109

- Asuradur menanggap bahwa hak untuk menerima premi dari pemegang polis akan diselesaikan dengan hak untuk menerima premi dari pialang asuransi.
- Piutang premi sebagai aset keuangan terpisah.

Ketika pemegang polis membayar premi kepada pialang asuransi, untuk kelompok kontrak:

	PAA tidak diterapkan	PAA diterapkan
Pendapat 1 – PSAK 117	Asuradur melanjutkan untuk memperlakukan piutang premi dari pialang asuransi sebagai arus kas masa depan dan memasukkannya dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi tersebut sampai diterima secara tunai.	Asuradur tidak meningkatkan liabilitas atas sisa masa pertanggungan – hal tersebut dilakukan hanya ketika asuradur menerima premi secara tunai dari pialang asuransi.
Pendapat 2 – PSAK 109	Asuradur mengeluarkan premi dari pengukuran kelompok kontrak asuransi dan mengakui aset keuangan terpisah.	Asuradur meningkatkan liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan mengakui aset keuangan terpisah.









# Arus kas dalam batasan kontrak asuransi dengan menerapkan PSAK 117

- PSAK 117 par 33 memasukkan dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi suatu estimasi dari seluruh kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap kontrak pada kelompok tersebut.
- PSAK 117 par PP65
  - arus kas dalam batasan kontrak asuransi adalah arus kas yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak, termasuk premi dari pemegang polis.
  - tidak membedakan antara premi yang ditagih langsung dari pemegang polis dan premi yang ditagih melalui pialang asuransi; sehingga premi dari pemegang polis yang ditagih melalui pialang asuransi termasuk dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi.

# Arus kas dikeluarkan dari pengukuran kelompok asuransi

- PSAK 117 par 34 arus kas berada dalam batasan kontrak asuransi jika arus kas tersebut muncul dari hak dan kewajiban substantif yang ada selama periode pelaporan ketika entitas dapat memaksa pemegang polis untuk membayar premi atau ketika entitas memiliki kewajiban substantif untuk menyediakan pemegang polis dengan jasa kontrak asuransi.
- Dalam pola fakta di mana asuradur belum menerima premi secara tunai, PSAK 117 tidak mengatur apakah arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi dikeluarkan dari pengukuran kelompok kontrak asuransi hanya ketika arus kas ini diterima atau diselesaikan secara tunai.







Dalam akuntansi untuk piutang premi dari pialang asuransi ketika pembayaran oleh pemegang polis telah melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi, asuradur mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk menentukan kapan arus kas dikeluarkan dari pengukuran kelompok kontrak asuransi

Asuradur dapat menentukan bahwa arus kas dikeluarkan ketika arus kas dipulihkan atau diselesaikan secara tunai (Pendapat 1), atau ketika kewajiban pemegang polis berdasarkan kontrak asuransi dipenuhi (Pendapat 2).

PSAK 117 dan PSAK 109 mengatur secara berbeda atas pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian kredit ekspektasian dari piutang premi dari pialang asuransi, dan asuradur disyaratkan untuk menerapkan semua persyaratan pengukuran dan pengungkapan dalam PSAK terkait.

- PSAK 117 (termasuk paragraf 131, mensyaratkan pengungkapan informasi tentang risiko kredit yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117), atau
- PSAK 109 (dan persyaratan dalam PSAK 107: Instrumen Keuangan) terhadap piutang premi dari pialang asuransi.

## **Kesimpulan:**

- Pendapat 1 atau Pendapat 2 dalam mencatat premi yang dibayar oleh pemegang polis dan piutang dari pialang asuransi berdasarkan persyaratan dalam PSAK 117 atau PSAK 109 akan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.
- Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 117 dan PSAK 109 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk mencatat premi yang dibayar oleh pemegang polis dan piutang dari pialang asuransi.









# **Buletin Implementasi Vol 3**

## PSAK 116: Sewa

01

Definisi sewa – hak substitusi

## **PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan**

02 Pengungkapan kelangsungan usaha

## PSAK 202: Persediaan

03 Estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan

## **PSAK 210: Peristiwa Setelah Periode Laporan**

04

Penyusunan laporan keuangan ketika entitas tidak memiliki kelangsungan usaha







#### **Definisi Sewa – Hak Substitusi**

**PSAK 116** 

Terdapat pertanyaan mengenai bagaimana cara menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa, yaitu mengenai:

- 1. tingkat untuk mengevaluasi apakah suatu kontrak mengandung sewa—dengan mempertimbangkan setiap aset secara terpisah atau seluruh aset secara bersama-sama—ketika kontrak tersebut untuk penggunaan lebih dari satu aset serupa; dan
- 2. cara menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa dengan menerapkan PSAK 116 ketika pemasok memiliki hak substitusi tertentu—yaitu pemasok:
  - i. memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan; tetapi
  - ii. tidak akan mendapatkan manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mengganti aset selama periode penggunaan.

#### **POLA FAKTA**

- 1. Pelanggan memiliki kontrak 10 tahun dengan pemasok untuk penggunaan 100 aset serupa yang baru, yakni baterai yang digunakan pada bus listrik. Pelanggan menggunakan setiap baterai bersamaan dengan sumber daya lain yang sudah tersedia (setiap baterai digunakan dalam bus yang dimiliki atau disewa oleh pelanggan dari pihak yang tidak berelasi dengan pemasok).
- 2. Diasumsikan bahwa pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode kontrak sehingga terdapat kondisi dalam paragraf PP14(a).
- 3. Jika sebuah baterai disubstitusi, pemasok diwajibkan untuk mengompensasi kerugian pelanggan atas pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul selama substitusi terjadi. Apakah substitusi memberikan manfaat secara ekonomik bagi pemasok pada suatu waktu tergantung pada jumlah kompensasi yang harus dibayar kepada pelanggan dan kondisi baterai.
- 4. Pada insepsi kontrak, diperkirakan bahwa pemasok tidak akan mendapatkan manfaat secara ekonomik dari substitusi baterai yang telah digunakan kurang dari tiga tahun tetapi bisa mendapatkan manfaat secara ekonomik dari penggantian baterai yang telah digunakan selama tiga tahun atau lebih.







#### **Definisi Sewa – Hak Substitusi**

**PSAK 116** 

#### PEMBAHASAN PERTANYAAN 1

Dengan menerapkan paragraf PP12 PSAK 116, pelanggan menilai apakah kontrak mengandung sewa—termasuk mengevaluasi apakah hak substitusi pemasok adalah substantif—untuk setiap komponen sewa terpisah yang potensial, yaitu untuk setiap baterai.

PSAK 116 paragraph PP12 menyatakan bahwa "entitas menilai apakah kontrak mengandung sewa untuk setiap potensi komponen sewa terpisah" dan mengarahkan entitas ke PSAK 116 paragaf PP32 untuk panduan penerapan komponen sewa terpisah.

#### **PEMBAHASAN PERTANYAAN 2**

PSAK 116 PP14 menyatakan, "bahkan jika asset disebutkan, pelanggan tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian jika pemasok memiliki hak substantif untuk mengganti aset tersebut selama periode penggunaan." Selanjutnya, paragraph PP14 menyatakan adanya dua kondisi yang harus dipenuhi untuk suatu hak substitusi dianggap substantif, yaitu:

- a. Pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan (sebagai contoh, pelanggan tidak dapat mencegah pemasok dari mensubstitusi asset dan asset alternatif tersedia untuk pemasok atau dapat disediakan oleh pemasok dalam waktu yang rasional);
- b. Pemasok akan mendapat manfaat ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi asset (yaitu manfaat ekonomik yang terkait dengan mensubstitusi asset diperkirakan melebihi biaya yang terkait dengan mensubstitusi asset









#### **Definisi Sewa – Hak Substitusi**

**PSAK 116** 

#### PEMBAHASAN PERTANYAAN 2

- Dalam pola fakta, setiap baterai ditentukan. Oleh karena itu, kecuali pemasok memiliki hak substantif untuk mensubstitusi baterai selama periode penggunaan, setiap baterai adalah aset identifikasian.
- Pemasok tidak memiliki hak substantif untuk mensubstitusi baterai selama periode penggunaan. Karena dalam pola fakta, diasumsikan terdapat kondisi di paragraf PP14(a), namun, karena pemasok tidak diperkirakan untuk mendapat manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi baterai setidaknya selama tiga tahun pertama kontrak, maka tidak terdapat kondisi di paragraf PP14(b) selama periode penggunaan.
- Untuk menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa, pelanggan menerapkan persyaratan dalam PSAK 116 paragraf PP21—PP30 untuk menilai selama periode penggunaan, apakah pelanggan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan, dan mengarahkan penggunaan, setiap baterai. Jika pelanggan menyimpulkan bahwa kontrak tersebut mengandung sewa, pelanggan akan menerapkan persyaratan dalam PSAK 116 paragraf 18–21 untuk menentukan masa sewa.







## Pengungkapan Kelangsungan Usaha

**PSAK 201** 

Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 201 paragraf 25 membutuhkan penerapan pertimbangan pertimbangan profesional. Sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya

#### **PEMBAHASAN**

- PSAK 201 Par. 25 mensyaratkan entitas mengungkapkan:
   "ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha"
- Agar pengungkapan ini bermanfaat, entitas harus mengidentifikasi bahwa ketidakpastian yang diungkapkan dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

**KESIMPULAN** 

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 201 memberikan dasar yang memadai bagi entitas









## Estimasi Biaya yang Diperlukan untuk Membuat Penjualan

**PSAK 202** 

Pertanyaan: Apakah entitas memasukkan seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan atau hanya biaya inkremental terhadap penjualan tersebut, ketika menentukan nilai realisasi neto dari persediaan?

#### **PEMBAHASAN**

- PSAK 202 paragraf 06 mendefinisikan nilai realisasi neto sebagai:
   "estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan".
- PSAK 202 paragraf 28–33 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan bagaimana entitas mengestimasi nilai realisasi neto. Paragraf tersebut tidak mengidentifikasi biaya spesifik yang "diperlukan untuk membuat penjualan" persediaan. Namun, PSAK 202 paragraf 28 menjelaskan tujuan penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto—tujuan tersebut adalah untuk menghindari pencatatan persediaan "melebihi jumlah yang diharapkan dapat direalisasi dari penjualannya".
- Dalam menentukan nilai realisasi neto dari persediaan, PSAK 202 tidak mengizinkan entitas untuk membatasi biaya tersebut hanya pada biaya yang bersifat inkremental, sehingga berpotensi mengecualikan biaya yang harus dikeluarkan entitas untuk menjual persediaan yang tidak bersifat inkremental terhadap penjualan tertentu. Sehingga menggunakan biaya inkremental saja dapat menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan yang disyaratkan dalam PSAK 202 paragraf 28.







## Penyusunan Laporan Keuangan ketika Entitas Tidak Memiliki Kelangsungan Usaha

**PSAK 210** 

Terdapat dua pertanyaan untuk entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha pada periode kini:

#### Pertanyaan 1:

Apakah entitas dapat menyusun laporan keuangan untuk periode-periode sebelumnya dengan dasar kelangsungan usaha jika terdapat kelangsungan usaha pada periode tersebut dan entitas belum pernah menyusun laporan keuangan untuk periode sebelumnya tersebut

#### **PEMBAHASAN**

Dengan menerapkan PSAK 201 paragraf 25 dan PSAK 210 paragraf 14, entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha tidak dapat menyusun laporan keuangan (termasuk laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diotorisasi untuk diterbitkan) atas dasar kelangsungan usaha.

#### Pertanyaan 2:

Apakah entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mencerminkan dasar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan jika sebelumnya entitas telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode komparatif dengan dasar kelangsungan usaha

#### **PEMBAHASAN**

Tidak ada keragaman penerapan SAK Indonesia sehubungan dengan pertanyaan kedua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak adanya bukti bahwa permasalahan ini berdampak luas.







## Penyusunan Laporan Keuangan ketika Entitas Tidak Memiliki Kelangsungan Usaha

**PSAK 210** 

PSAK 201 paragraf 25 mensyaratkan entitas untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kelangsungan usaha "kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya.

PSAK 210 paragraf 14 mensyaratkan "entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika manajemen menetapkan setelah periode pelaporan bahwa manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut."

Dengan menerapkan kedua paragraf tersebut, entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha tidak dapat menyusun laporan keuangan (termasuk laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diotorisasi untuk diterbitkan) atas dasar kelangsungan usaha.







# PANDUAN PRAKTIK SAK Membuat Pertimbangan Materialitas









# PEDOMAN DALAM PANDUAN PRAKTIK

## PANDUAN PRAKTIK SAK – MEMBUAT PERTIMBANGAN MATERIALITAS







Memberikan gambaran tentang karakteristik umum materialitas.

Menyajikan proses empat langkah dalam membuat pertimbangan materialitas ketika menyusun laporan keuangannya (proses materialitas).

Memberikan panduan mengenai cara membuat pertimbangan materialitas dalam keadaan tertentu.









# KARAKTERISTIK UMUM MATERIALITAS

1 Pervasif

Kebutuhan akan pertimbangan materialitas adalah pervasif dalam penyusunan laporan keuangan.

2 Pertimbangan manajemen

Ketika menerapkan pertimbangan materialitas, entitas mempertimbangkan keadaan spesifiknya dan bagaimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menanggapi kebutuhan informasi pengguna utama. Karena keadaan entitas berubah seiring berjalannya waktu, pertimbangan materialitas dinilai ulang pada setiap tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan tersebut.

Pengguna utama & kebutuhan informasinya

Entitas perlu mempertimbangkan jenis keputusan apa yang dibuat oleh pengguna utamanya berdasarkan laporan keuangan dan, sebagai konsekuensinya, informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan tersebut.

Dampak informasi yang tersedia untuk umum

Pengguna utama laporan keuangan pada umumnya mempertimbangkan informasi dari sumber selain laporan keuangan. Namun demikian, laporan keuangan disyaratkan menjadi dokumen komprehensif dan ketersediaan informasi bagi publik tidak membebaskan entitas dari kewajiban menyediakan informasi material dalam laporan keuangannya.







# **PROSES MATERIALITAS - 4 LANGKAH**

TAHAP 1
Mengidentifikasi

TAHAP 2 Menilai TAHAP 3
Mengatur

**TAHAP 4** Meninjau

Persyaratan atas SAK

Pengetahuan tentang kebutuhan informasi pengguna utama



Mengatur informasi dalam draf Laporan Keuangan



Meninjau draf Laporan Keuangan







## **FAKTOR KUANTITATIF & KUALITATIF**





#### **FAKTOR KUANTITATIF**

Mengidentifikasi ukuran yang digunakan oleh suatu entitas dalam membuat penilaian kuantitatif merupakan suatu hal pertimbangan. Pertimbangan tersebut bergantung pada ukuran mana yang menjadi kepentingan utama pengguna utama laporan keuangan entitas. Contohnya mencakup ukuran pendapatan entitas, profitabilitas entitas, rasio posisi keuangan, dan ukuran arus kas.

#### **FAKTOR KUALITATIF**



Dalam membuat pertimbangan materialitas, entitas mempertimbangkan faktor:

- kualitatif spesifik-entitas
   karakteristik transaksi, peristiwa, atau kondisi lain entitas
- b. kualitatif eksternal karakteristik di mana transaksi entitas, peristiwa atau kondisi lain terjadi yang, jika ada, membuat informasi semakin besar kemungkinannya untuk memengaruhi keputusan pengguna utama, misalnya lokasi geografis, keadaan ekonomi di mana entitas beroperasi.

#### **INTERAKSI FAKTOR KUANTITATIF & KUALITATIF**

Penilaian kuantitatif saja tidak selalu cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu *item* informasi tidak material. Entitas harus menilai lebih lanjut keberadaan faktor kualitatif. Kehadiran faktor kualitatif menurunkan ambang batas penilaian kuantitatif.









# **Topik Tertentu**

- 1 Informasi periode sebelumnya
- 2 Kesalahan
- 3 Informasi tentang kovenan
- 4 Pertimbangan materialitas untuk pelaporan interim
- 5 Informasi tentang kebijakan akuntansi









# **INFORMASI PERIODE SEBELUMNYA**

Entitas membuat pertimbangan materialitas atas laporan keuangan lengkap, mencakup informasi periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan.



# Informasi periode sebelumnya yang tidak disajikan sebelumnya

Pencantuman informasi periode sebelumnya yang sebelumnya tidak disertakan akan disyaratkan jika hal ini dibutuhkan agar pengguna utama dapat memahami laporan keuangan periode berjalan.



#### Meringkas informasi periode sebelumnya

Entitas dapat meringkas informasi periode sebelumnya, dengan mempertahankan informasi yang dibutuhkan bagi pengguna utama untuk memahami laporan keuangan periode berjalan.

Contoh - Pada periode sebelumnya, entitas mempunyai jumlah utang yang sangat kecil dan dinilai sebagai tidak material pada periode sebelumnya, sehingga entitas tidak mengungkapkan analisis jatuh tempo sesuai PSAK: 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan paragraf 39(a). Pada periode berjalan, entitas menerbitkan utang dalam jumlah besar. Entitas menyimpulkan bahwa informasi mengenai jatuh tempo utang merupakan informasi material dan mengungkapkannya dalam bentuk tabel dalam laporan keuangan periode berjalan.

**Contoh -** Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangan periode sebelumnya, rincian perselisihan hukum. Sebagian besar ketidakpastian telah diselesaikan pada periode berjalan, dan meskipun liabilitas belum diselesaikan, keputusan pengadilan menegaskan jumlah yang telah diakui dalam laporan keuangan oleh entitas. Entitas mempertimbangkan undang-undang, peraturan lokal dan persyaratan pelaporan lainnya dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat kewajiban yang diatur secara lokal terkait dengan pencantuman informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan.







## **KESALAHAN**

Kesalahan material adalah kesalahan yang secara individual atau secara kolektif diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama atas dasar laporan keuangan tersebut.



#### Kesalahan kumulatif

Untuk menilai apakah kesalahan kumulatif menjadi material dalam laporan keuangan periode berjalan, entitas mempertimbangkan apakah, pada periode berjalan:

- a. keadaan entitas telah berubah, sehingga menyebabkan penilaian materialitas yang berbeda pada periode berjalan; atau
- b. akumulasi lebih lanjut dari kesalahan periode berjalan ke dalam kesalahan kumulatif telah terjadi.

Entitas harus mengoreksi kesalahan kumulatif jika kesalahan tersebut menjadi material dalam laporan keuangan periode berjalan.









## **INFORMASI TENTANG KOVENAN**

Entitas menilai materialitas atas informasi tentang keberadaan dan persyaratan klausul perjanjian pinjaman (kovenan), atau pelanggaran kovenan, untuk memutuskan apakah akan menyediakan informasi terkait dengan kovenan dalam laporan keuangan.



Ketika terdapat kovenan, entitas mempertimbangkan dua hal berikut:

- a. konsekuensi pelanggaran yang terjadi, yaitu dampak pelanggaran kovenan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.
- b. kemungkinan terjadinya pelanggaran kovenan.

Informasi mengenai suatu kovenan yang konsekuensi pelanggarannya akan berdampak pada posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas dengan cara yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan pengguna utama, namun pelanggaran tersebut kecil kemungkinannya terjadi, adalah tidak material.







# PERTIMBANGAN MATERIALITAS UNTUK PELAPORAN INTERIM



Untuk laporan keuangan interim, entitas mempertimbangkan faktor materialitas yang sama seperti dalam penilaian tahunannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa jangka waktu dan tujuan laporan keuangan interim berbeda dengan laporan keuangan tahunan.



Dalam membuat pertimbangan materialitas atas laporan keuangan interimnya, entitas berfokus pada periode yang dicakup oleh laporan tersebut, yaitu:

- a. entitas menilai apakah informasi dalam laporan keuangan interim adalah material sehubungan dengan data keuangan periode interim.
- b. entitas menerapkan faktor materialitas berdasarkan data periode interim berjalan dan juga, jika terdapat lebih dari satu periode interim (misalnya dalam kasus pelaporan triwulanan), data untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim.
- c. entitas mempertimbangkan apakah akan menyajikan dalam laporan keuangan interim informasi yang diperkirakan material bagi laporan keuangan tahunan.

#### **Estimasi Pelaporan Interim**

Ketika entitas menyimpulkan bahwa informasi mengenai **ketidakpastian estimasi adalah material**, maka entitas perlu **mengungkapkan** informasi tersebut.

Pengukuran yang dicakup dalam laporan keuangan interim seringkali lebih mengandalkan estimasi dibandingkan pengukuran yang dicakup dalam laporan keuangan tahunan.









## KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas disyaratkan untuk mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi material, peristiwa atau kondisi lain jika informasi tersebut material terhadap laporan keuangan.

## Diagram — menentukan apakah informasi kebijakan akuntansi material

Apakah transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berkaitan dengan informasi kebijakan akuntansi bersifat material secara jumlah atau sifatnya, atau kombinasi keduanya? YA TIDAK Informasi kebijakan akuntansi yang terkait dengan Apakah informasi kebijakan akuntansi yang terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak lain yang material, dengan sendirinya bersifat material terhadap laporan keuangan (PSAK material adalah tidak material dan tidak perlu 201 paragraf 117B)? diungkapkan (PSAK 201 paragraf 117A dan 117D). TIDAK YA Informasi kebijakan akuntansi tidak material yang Informasi kebijakan akuntansi material terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain harus diungkapkan (PSAK 201 paragraf yang material tidak perlu diungkapkan (PSAK 201 117 dan 117C). paragraf 117A dan 117D).

Catatan: kesimpulan entitas bahwa informasi kebijakan akuntansi adalah tidak material tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang diatur dalam PSAK lainnya (PSAK 201 paragraf 117E).







PPL Online Ti MS Teams

# Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK Update



elatihan ini bertujuan agar peserta mampu memahami dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Serta dapat memahami persyaratan dalam penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

#### Narasumber:

- O Tim Implementasi SAK IAI
- O Praktisi yang berkompeten di bidangnya



#### Materi Pelatihan

- 1. PSAK 201 Penyajian Laporan keuangan
- 2. PSAK 207 Laporan Arus Kas
- 3. PSAK 234 Laporan Keuangan Interim
- 4. PSAK 208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- 5. ISAK 110 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

















PPL Online | Ti MS Teams

# **PENERAPAN PSAK 115 (SEBELUMNYA PSAK 72) PSAK 116 (SEBELUMNYA PSAK 73) DI INDONESIA**

24-26

13.00-16.30 WIB



#### Narasumber:

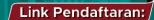
Budi Susanto (Ketua Tim Implementasi IAI) Ardhie Widyantho Sumarso, SE., M.Acc., BKP., CPSAK.

#### Biaya Investasi:

Anggota Aktif IAI: ID1,250,000 Alumni Kursus IAI: IDR1.500.000 Non Anggota IAI: IDR1.750.000







https://bit.ly/e-PPL-115PSAK0624

























# Pelatihan Pajak Terapan **Brevet A&B Terpadu** dan Brevet C

<sup>44</sup>Pelatihan Brevet IAI: AHLI PAJAK, BEDAH SUBSTANSI, TEMUKAN SOLUSI,,

Kelas **Tatap Muka** 

WA Official IAI





Kelas Virtual











#### Benefit-

- Pembahasan issue update Perpajakan
- Kuliah umum Perpajakan
- Gathering alumni
- Dapat diikuti di seluruh Indonesia bahkan luar negeri
- Instruktur berpengalaman dan profesional

- Recording untuk reviu materi pembahasan
- Sertifikat Ikatan Akuntan Indonesia
- Modul dan Pembahasan Terupdate

#### **Biaya Pelatihan Tatap Muka:**

#### **Brevet A&B Terpadu**

Non Anggota IAI Rp4.900.000 Anggota Aktif IAI Rp4.400.000

Alumni Kelas IAI/

Mahasiswa S1 Rp4.650.000

#### Brevet C

Non Anggota IAI Rp3.900.000 Anggota Aktif IAI Rp3.650.000 Alumni Kelas IAI Rp3.400.000

#### **Biaya Pelatihan Virtual:**

#### **Brevet A&B Terpadu**

Non Anggota IAI Rp3.500.000

Anggota Aktif IAI/

Mahasiswa S1 Rp3.300.000

#### **Brevet C**

Non Anggota IAI Rp2.900.000 Rp2.600.000 Anggota Aktif IAI Alumni Kelas IAI Rp2.500.000

#### **Lokasi Kelas Tatap Muka:**

**IAI Knowledge Center Menteng** 

IAI Knowledge Center MOI

**IAI Knowledge Center Fatmawati** 

**IAI Knowledge Center Summarecon Bekasi** 











## SIMPOSIUM NASIONAL **AKUNTANSI XXVII**

& International Conference (ICAE)



"Building the Character of Accountants with a SDGs Insight to Welcome Golden Indonesia 2045"

Simposium Nasional Akuntansi merupakan Agenda Tahunan Kompartemen Akuntan Pendidik IAI (KAPd IAI) yang membahas hasil-hasil penelitian terkini di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Pemerintahan, Perpajakan, dan Sistem Informasi Akuntansi.

# CALL FOR PAPER



PEMBUKAAN

**BATAS AKHIR** 









Go Show

Rp 2.800.000\*

Rp 2.950.000\*

Rp 1.000.000

OFFLINE

#### TANGGAL PENTING

Pembukaan penerimaan paper

Batas akhir penerimaan paper

Keputusan penerimaan paper

Batas akhir registrasi

Tanggal Oktober 2024

#### \*\* Tidak termasuk iuran keanggotaan IAI selama 1 tahun

IAI Member

Non IAI Member Mahasiswa S1 dan S2

Mahasiswa S3 masuk harga umum

Bagi pemakalah yang menyajikan lebih dari 1 makalah (baik sebagai penulis pertama atau anggota, maksimal 3 makalah), maka makalah berikutnya dikenakan tambahan investasi sebesar Rp400.000,00/makalah.

#### Rekening Pembayaran:

Bank Mandiri KCP Jakarta Cik Ditiro 122.000.614.9564 a.n Ikatan Akuntan Indonesia-KAPd

\* Termasuk iuran keanggotaan IAI selama 1 tahun

**BIAYA REGISTRASI SNA XXVII Bengkulu** 

Early Bird

(s.d 18 Agustus

Rp 1.450.000\*\*

Rp 2.150,000

Rp 750,000

#### Sekretariat SNA XXVII Bengkulu & ICAE 2024

#### Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, 2. Lisa Martiah Nila Puspita: 0813 6734 4732 Bengkulu 38371A

#### Contact Person:

- 1. Herawansyah: 0813 4444 0296



www.iaiglobal.or.id

Normal

Rp 2.250.000°

Rp 2.350,000

Rp 750.000



https://sna-iaikapd.or.id/sna27bengkulu





https://sna-iaikapd.or.id/sna27bengkulu



"SAATNYA **WUJUDKAN MIMPI, JADILAH AKUNTAN PROFESIONAL...!"** 

IAI mengundang mahasiswa akuntansi berprestasi dan asisten dosen S1 di seluruh Indonesia, dalam program

"1.000 **BEASISWA CHARTERED** ACCOUNTANT **INDONESIA**"

> Batas waktu pendaftaran paling lambat 30 Juni 2024









#### Syarat & Ketentuan

menjadi Anggota Muda IAI;

Link pendaftaran keanggotaan IAI: https://membership.iaiglobal.or.id/

- minimal semester 5 pada program D4/S1
- PK minimal 3.00;
- Ujian CA, paling lambat 6 bulan setelah dinyatakan sebagai penerima beasiswa CA;
- 😕 rekomendasi dari Perguruan Tinggi.

#### Referensi Ujian CA

Informasi terkait silabus, contoh soal lampau, dan modul ujian CA dapat dilihat melalui link berikut:

- Silabus ujian CA: https://bit.ly/SilabusUjianCA
- Contoh soal lampau: https://bit.ly/ContohSoalUjianCA
- Modul ujian CA: https://bit.ly/ModulUjianCA



#### **Cara Mendaftar**

Mengisi lengkap data registrasi di link:

https://bit.ly/BeasiswaCA2024











































# **TERIMA KASIH**











Professional Accountant is just one click away

Tersedia





#### **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id



Linked In Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter @IAINews

Instagram @ikatanakuntanindonesia